



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2023

Kecamatan Kerjo
Kabupaten Karanganyar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI
KATAPENGANTAR.....
BAB I PENDAHULUAN.....
 1.1. Latar Belakang
 1.2. Landasan Hukum.....
 1.3 Maksud dan Tujuan.....
 1.4 Sistematika Penulisan.....
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
 Capaian Perangkat Daerah
 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....
 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Pernagkat Daerah
 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan mengenai
 a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
 program dan kegiatan
 b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
 c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
 rancangan awal RKPD
 d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pekerjaan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kerjo Tahun 2023 dapat disusun. Renja OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang pembuatan dan sistematika Renja OPD dan Dasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karanganyar.

Bagi Institusi Kecamatan Kerjo Renja ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No.4 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan Kerjo disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan. Renja OPD Kecamatan Kerjo ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPD di dalam kurun waktu mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Kerjo, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Kerjo.

Kerjo, Juli 2022

Drs. WAHYU WIDIYANTO,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661124 199303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Kerjo berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Kerjo agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2023.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Jatiyoso memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo tahun 2023 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaaan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Naomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
19. Peraturan Bupati Karanganyar No 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2019 tentang SPM;
21. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.

I.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2023 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kerjo Tahun 2023.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Kerjo pada Tahun 2023.
2. Memberikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga Tahun 2023.

I.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Kerjo, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu,

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kerjo

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Kerjo berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan realisasi APBD Kecamatan Kerjo .

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2013 – 2018. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kerjo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 2.548.310.000,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.262.510.000,- dan Belanja Langsung Rp. 285.800.000,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp 2.375.774.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.989.974.000,- dan Belanja Langsung Rp 385.800.000,-.

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo dan Pencapaian Renstras/d Tahun 2022Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kerjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
	Unsur Kewilayahan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	87,97		0		0	87,97	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Penyediaan jasa surat menyurat		93		0		0	93,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air		74,9		0		0	74,90	

		dan listrik								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor		91,3		0		0	91,30	
	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor		79,1		0		0	79,10	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		97		0		0	97,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		95,5		0		0	95,50	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		83,3		0		0	83,30	
	Penyediaan bahan logistik rumah dinas	tersedianya bahan logistik		85,2		0		0	85,20	
	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman		85,3		0		0	85,30	

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		95,1		0		0	95,10	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	77,44		0		0	77,44	
	Pengadaan komputer	Tersedianya komputer		99,7		0		0	99,70	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100		0		0	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		87,5		0		0	87,50	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor		0		0		0	0,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor		100		0		0	100	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional		93,3		0		0	93	

	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas		-		0		0	-	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		-		0		0	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	-	100		0		0	100	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKjIP		-		0		0		
	Penyusunan RKA-DPA	Tersusunnya dokumen RKA-DPA		0		0		0	0	
	Penyusunan laporan barang inventarisasi	Tersusunnya laporan barang inventarisasi		0		0		0	0	
	Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD		0		0		0	0	
	Penyusunan LKjIP	Tersusunnya LKjIP		95		0		0	95	
	Fasilitasi Penyusunan Renja	Tersusunnya Renja		98,5		0		0	99	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			0		0		0	0	
	Pembinaan Wilayah / Daerah			0		0		0	0	

	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			0		0		0	0	
	Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan			0		0		0	0	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			0		0		0	0	
	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya			0		0		0	0	
	Fasilitasi kegiatan FKUB tingkat kecamatan			0		0		0	0	
	Fasilitasi Pakibraka Kecamatan			0		0		0	0	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			0		0		0	0	
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			0		0		0	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa			0		0		0	0	
	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perlombaan Desa/kelurahan			0		0		0	0	
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa			0		0		0	0	
	Pembinaan Perangkat Desa			0		0		0	0	

	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa			0		0		0	0	
	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa			0		0		0	0	
	Fasilitasi Pengisian kekosongan formasi jabatan perangkat Desa se - Kabupaten			0		0		0	0	
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			0		0		0	0	
	Pembinaan PKK Desa			0		0		0	0	
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga			0		0		0	0	
	Fasilitasi Keolahragaan			0		0		0	0	
	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Cakupan Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah		94,86		0		0	94,86	
	Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	Terlaksananya pembinaan linmas dan desa/wilayah		86,8		0		0	86,80	
	Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan sosial	Terlaksananya Fasilitasi keg.FKUB,Paskib raka, Kepemudaan serta keg.sosbud, tarling forkompinca		100		0		0	100	

	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK,Lomba desa, Dana Desa dan Musrenbang		89,7		0		0	89,70	
	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pembinaan adm.desa dan pengisian formasi jabatan		97,8		0		0	97,80	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	Tersusunnya dokumen survey kepuasan masyarakat dan keg. legalisasi		100		0		0	100	

7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70	100	67	70,71	105,54%	69	139,71	2,00
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	99,87	99,87%	89,73	189,59	
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja, RKA-DPA			100	99,93	99,93%	99,9	199,83	
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LKjIP			100	99,8	99,80%	99,8	199,60	

7.01.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	98,16	98,16%	54	152	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN			100	98,16	98,16%	46,83	145	
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	91,58	91,58%	32,95	124,53	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100	99,32	99,32%	58,1	157,42	
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor			100	99,85	99,85%	17,4	117,25	
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik			100	92,99	92,99%	38,6	131,59	
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan			100	93,01	93,01%	48	141,01	
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			100	83,33	83,33%	25	108,33	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			100	80,99	80,99%	10,6	91,59	

	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			100	99,99	99,99%	0	99,99	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya				100	99,99	99,99%	0	99,99	
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			100	89,19	89,19%	45,17	134,35	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Penyediaan jasa surat menyurat			100	100	100%	52,6	153	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100	69,91	69,91%	35,6	105,51	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor			100	97,65	97,65%	47,3	144,95	
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>			100	88,97	88,97%	16,37	105,34	

7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			100	88,32	88,32%	42,7	131,02	
7.01.01.2.0 9.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor yang Memadai			100	99,19	99,19%	0	99,19	
7.01.01.2.0 9.11	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			100	79,41	79,41%	6,4	85,81	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75		72	80,472	111,77%	74	154,47	2,06
7.01.02.2.0 2	<i>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yangbada di kecamatan</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yangbada di kecamatan</i>			100	91,11	91,11%	0	83	
7.01.02.2.0 2.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Legalisasi dan kegiatan Paten Kecamatan			100	91,11	91,11%	0	91,11	

7.01.02.2.0 2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Legalisasi di Kecamatan			100	0	0%	83	83	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	90		80	100	125%	80	180	2,00
7.01.03.2.0 1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			100	84,7	84,70%	100	184,70	
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang			100	84,7	84,70%	41,3	126,00	
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK, Lomba Desa			100	84,7	84,70%	62,7	147,40	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa dalam keadaan kondusif	80		80	100	125%	80	180	2,25
7.01.04.2.0 1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>			100	83,81	83,81%	38,3	122,11	

7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya pembinaan linmas dan pembinaan wilayah			100	83,81	83,81%	38,3	122,11	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	90		90	100	111,11%	22	122	1,36
7.01.05.2.0 1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			100	99,95	99,95%	22	122	
7.01.05.2.0 1.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Fasilitas keg. FKUB, Paskibraka, Kepemudaan serta kegiatan Sosbud dan Tarling			100	99,95	99,95%	0	99,95	
7.01.05.2.0 1.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas keg. Paskibraka dan Forkompinca			0	0	-	44	44	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa / kelurahan tertib Perda	90		80	0	0%	0	0	0

7.01.06.2.0 1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			100	0	0%	0	0	
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa			100	0	0%	0	0	
7.01.06.2.0 1.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya kegiatan pengisian formasi jabatan			100	0	0%	0	0	

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kerjo berdsarakan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan denga tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kerjo
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2020	Th 2021	Th 2022 SMT I	Th 2022	Th 2023	
1	Nilai SAKIP		Nilai	-	67	69	70	71,82	70,71		69	75	
2	Indek Kepuasan Masyarakat		Skor	-	72	74	75	83,650	80,472		74	70	

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karanganyar

Tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi dunia disebabkan masih mewabahnya Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan-kebijakan agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2021 semua Program masih dilakukan pengalihanfokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kerjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
- e. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.

III.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Perangkat Daerah yang merupakan penugasan dari Renstra Perangkat Daerah atas bagai turunan dari RKPD yang merupakan penugasan dari RPJMD, adalah sebuah runtutan proses atau alur mekanisme perencanaan yang harus disusun sebagai sebuah Dokumen Perencanaan. Berdasarkan uraian tersebut, berarti rancangan awal RKPD sesuai dengan apa yang dituangkan dalam RPJMD.

Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk Belanja tahun 2023 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp. 3.017.500.000,-. Sedangkan menurut hasil analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. 2.753.614.000,- termasuk belanja gaji dan tunjangan PNS. Adanya perbedaan penganggaran antara rancangan awal RKPD dan menurut hasil analisis kebutuhan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Untuk melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut:

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec.kerjo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	2.911.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec.kerjo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	2.648.614.000	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec.kerjo	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	1.000.000	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec.kerjo	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	1.000.000	
	administrasi keuangan perangkat daerah	Kec.kerjo	Cakupan administrasi keuangan	100	2.200.000.000	administrasi keuangan	Kec.kerjo	Cakupan administrasi keuangan	100	2.109.974.000	
	administrasi umum perangkat daerah	Kec.kerjo	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	102.800.000	administrasi umum perangkat daerah	Kec.kerjo	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	83.340.000	
	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec.kerjo	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	111.700.000	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec.kerjo	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	79.700.000	

	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.kerjo	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	375.000.000	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.kerjo	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	323.000.000	
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.kerjo	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	61.000.000	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.kerjo	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	51.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.kerjo	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.kerjo	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	5.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.kerjo	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100	5.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.kerjo	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100	5.000.000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.kerjo	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100	20.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.kerjo	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100	20.000.000	

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.kerjo	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	20.000.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.kerjo	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	20.000.000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.kerjo	Pesentase desa / kelurahan tertib Perda	100	20.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.kerjo	Pesentase desa / kelurahan tertib Perda	100	20.000.000	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.kerjo	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	20.000.000	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.kerjo	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	20.000.000	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.kerjo	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	41.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.kerjo	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	40.6000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.kerjo	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	41.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.kerjo	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	40.600.000	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.kerjo	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	20.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Kec.kerjo	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	20.000.000	

						KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.kerjo	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	20.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.kerjo	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	20.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Kecamatan Kerjo yang utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentu akan mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat.

Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan.

Adapun Kegiatan yang merupakan usulan dari Kecamatan sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1	Pembangunan dan Rehab Lapangan Karangrejo	Dusun Prayan	Lapangan multifungsi tingkat Kecamatan	100mx 60mx3m	400.000.000	
2	Penataan Lingkungan Kecamatan dan penerangan jalan	Lingkungan Kecamtan	Tata Kota Rapi	1 Paket	1.000.000.000	
3	Betonisasi & Talud Jalan Usaha Tani Dusun Grobogan - Dusun Pengin	Dusun Grobogan RT.02/04 s/d Dusun Pengin RT.05/05Kuto	Pengerasan sarana prasarana Jalan	1050 m	600.000.000	
4	Betonisasi Jalan Karanggandu- Karangrejo	Rt 003/ 002Gempolan	Pengerasan sarana prasarana Jalan	400 m	200.000.000	
5	Aspal Ruas Jalan Tawang Sari Sampai Sumberejo	Tawang Sari - Sumberjo	Transportasi lancar	4000 m	1.000.000.000	
6	Betonisasi dan makadam jalan antar Desa	Ganten - Tamansari	Transportasi lancar	665 m	300.000.000	

	Ganten - Desa Tamansari					
7	Pelebaran Jalan dan pengaspalan jalan Tamnsari - Sidi	Taman rt 01/02Tamansari	Transportasi lancar	1000 m	1.500.000.000	
8	Betonisasi sayap jalan Dusun Kerjo - Dusun Sumberejo	Dusun Kerjo - Sumberejo	Transportasi lancar	2000 m	300.000.000	
9	Pelebaran Jl.Srikandi Dusun Botok	Desa Botok, Kecamatan Kerjo	Transportasi lancar	1500 mm	500.000.000	
10	Talud dan pengaspalan jalan dari Dusun Kurahan sampai Dukuh Bangkle	Dusun Kurahan – BangkleKarangrejo	Talud jalan kanan dan kiri	120 m3	1.000.000.000	
11	Aspal jalan Plosorejo - Seloromo	Plosorejo	Transportasi lancar	3,5X4000 M	4.000.000.000	
12	Pembangunan Jembatan Dung Dalam dan betonasi	Majan RT 02 RW 02Kwadungan	Transportai jalan usaha tani lancar	3 X 15 m / 500X2,5 m	1.000.000.000	

1. Bidang Sarana dan Prasarana

2. Bidang Ekonomi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1	Badan Usaha milik Desa (BUMDes)	Karangrejo	Penyertaan Modal BUMDES	Beroprasi produksi	400.000.000	
2	Bantuan Pemberdayaan Ekonomi perempuan	Kwadungan	Ibu Rumah Tangga RTM	6 Paket	600.000.000	
3	Bantuan Ternak 8 Kelompok	Tawangsari	Kelompok Tani	8 Paket	400.000.000	
4	Pasar Desa	Gempolan	Pemasaran hasil tani dan kerajinan warga	1 Paket	200.000.000	
5	Penyertaan Modal BUMDES	Plosorejo	Penyertaan Modal BUMDES	Paket	200.000.000	
6	Kolam renang dan taman bermain	Dusun kerjo RT 01/02	Kolam renang dan taman bermain	Paket	500.000.000	
7	Kolam renang dan taman bermain	Babadan RT02/05	Kolam renang dan taman bermain	Paket	300.000.000	
8	Bantuan Modal Bagi Kelompok Ternak dan	Ganten	Memulihkan ekonomi	6 Paket	300.000.000	

	KWT					
9	Pengembangan UMKM Masyarakat Desa	Kuto	Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Rumahan Masyarakat Desa	1 Paket	200.000.000	

3. Bidang Sosial Budaya

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
1	2	3	4	6		6
1	Agrowisata Amongrogo di Desa Karangrejo	Karangrejo	Memfaatkan Kontur tanah Pegunungan dan Wisata Terpadu	Beroprasi 100%	300.000.000	
2	Penambahan untuk seni reog	Gempolan	Melestarikan Kesenian Reog	4 paket	100.000.000	
3	Pengembangan Wayang Orang	Tawang Sari	Melestarikan Budaya	1 Paket	50.000.000	
4	Bantuan Alat reog (Dadak Merak) Wahyu Putro dito	Ganten	Melestarikan Kesenian reog	1 paket	50.000.000	
5	Alat musik campursari	Tamansari	Miningkatnya prestasi seni dan budaya	1 paket	75.000.000	
6	Alat musik campursari	Sumberejo	Alat musik campursari	1 paket	75.000.000	
7	Pengembangan kesenian Reog	Kwadungan	Melestarikan budaya	6 paket	120.000.000	
8	Pengembangan kesenian Reog	Plosorejo	Melestarikan kesenian budaya	1 paket	120.000.000	

4. Bidang Pemerintahan Umum

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1	Posko Relawan Tangguh Bencana	Desa Tamansari	Posko Relawan Tangguh Bencana	Paket	50.000.000	
2	Pembangunan Kantor Desa	Desa Plosorejo	Kelancaran Pelayanan	1 Paket	250.000.000	
3	Rehabilitasi Balai Desa	Desa Kwadungan	Kelancaran Pelayanan	1 unit	250.000.000	
4	Pembangunan Aula Desa	Desa Tawang Sari	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1 Paket	400.000.000	
5	Rehab dan Pembangunan	Desa Gempolan	Kelancaran Pelayanan	1 Paket	500.000.000	

	Pendopo desa					
6	Posko Relawan Tangguh Bencana	Desa Sumberejo	Posko Relawan Tangguh Bencana	Paket	50.000.000	
7	Rehap Kantor Desa	Desa Ganten	Agar pelayanan berjalan efektif dan lancar	1 unit	250.000.000	

5. Bidang Kesehatan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1	Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa Kuto	Pelayanan Kesehatan Desa	1 Unit	300.000.000	

Dariusulan-

usulan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diisera pkan dalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, sehingga pengusulan program dan kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran dan usulan serta kebutuhan program dan kegiatan pada Kecamatan Kerjo.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

NIHIL

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kerjo

3.2.1 Tujuan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Kerjo merupakan dokumen perencanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan Tahun 2023. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kerjo Tahun 2023 adalah :

- Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan mengenai:

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kerjo terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1. berjuang, 2. bersama, 3. memajukan, 4. Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.

- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang di lakukan untuk mewujudkan visi yang Ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arah dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa

menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaankeyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan mudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan

pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kerjo mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kerjo adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: ***Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.***

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

b. Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang diakomodir dalam Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2022 ada 6 Program dan 11 Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrai Keuangan
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintahan
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinaasi penyelenggraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
- 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan pengawasan pemerintah desa
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kerjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	Kec Kerjo	70	2.753.614.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		75	2.726.914.000
7.01.01.2.01	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah	Kec Kerjo	100	1.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	1.200.000
	administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan administrasi keuangan	Kec Kerjo	100	2.109.974.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	2.109.974.000
	administrasi umum perangkat daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kec Kerjo	100	83.340.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	83.340.000
	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec Kerjo	100	79.700.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	60.000.000
	penyediaan jasa	Cakupan penyediaan	Kec	100	323.000.000	Dana		100	323.000.000

	penunjang urusan pemerintahan daerah	jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kerjo			Transfer Umum Dana Alokasi Umum			
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec Kerjo	100	51.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	44.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec Kerjo	75	5.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		80	5.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Kerjo	100	5.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	5.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CakupanProgram Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec Kerjo	90	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		90	20.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Kerjo	100	10.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	10.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Cakupan Pemberdayaan	Kec Kerjo	100	10.000.000	Dana Transfer		100	10.000.000

	Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Umum Dana Alokasi Umum			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec Kerjo	90	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		90	20.000.000
	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec Kerjo	100	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	20.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec Kerjo	90	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		90	20.000.000
	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec Kerjo	100	20.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	20.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kec Kerjo	80	40.600.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		80	40.600.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Kerjo	100	40.600.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	40.600.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN							2.753.614.000					2.726.914.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.648.014.000					2.621.314.000	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.000.000					1.000.000	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		5 Dokumen		500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500.000	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 Laporan		500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500.000	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.109.974.000					2.109.974.000	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		19 Orang/bulan		2.109.974.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.109.974.000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							83.340.000					83.340.000	

7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		14 Paket		3.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.360.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		20 Paket		22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22.000.000
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 Paket		40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40.000.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		5 Paket		3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.000.000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.980.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		50 Laporan		11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.000.000

7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		20 Dokumen		2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)				2.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								79.700.000					60.000.000
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya kendaraan dinas yang memadai		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 unit		32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (kursi susun)		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		51 Unit		19.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (tangga telescopic)		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 Unit		28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								323.000.000					323.000.000
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaraanya jasa surat menyurat		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 Laporan 12 bulan		19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19.000.000

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 Laporan 12 Bulan		24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24.000.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 Laporan 12 Bulan		280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				280.000.000
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							51.000.000					44.000.000
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		6 Unit		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20.000.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		4 unit		4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.000.000

7	01	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan	20 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan	1 Unit	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan	1 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.000.000		5.000.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.000.000		5.000.000
7	01	02	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan	1 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.000.000		20.000.000
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				10.000.000		10.000.000

7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Musrenbangdes		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		4 Lembaga 1 Kegiatan		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.000.000
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							10.000.000					10.000.000	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (PKK) Terselenggarakan kegiatan kegiatan PKK		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		1 Lembaga 12 Bulan		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							40.600.000					40.600.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							40.600.000					40.600.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terselenggarakan		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		12 Laporan 12 bulan		40.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40.600.000

							anya pembinaan Linmas dan pembinaan wilayah di Kecamatan										
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							20.000.000					20.000.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							20.000.000					20.000.000
7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Terselenggar anya Kegiatan FKUB di Kecamatan		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		50 Orang 1 Kegiatan		10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggar anya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		12 Bulan		10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							20.000.000					20.000.000
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							20.000.000					20.000.000

7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.000.000
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan		2 Dokumen		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.000.000
TOTAL													2.753.614.000					2.726.914.000

BAB VI

PENUTUP

Selama Tahun Anggaran 2021 secara umum program - program yang telah direncanakan di Kecamatan Kerjo telah berjalan dengan baik, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran srategik dan kegiatan – kegiatan utama pendukung perencanaan sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran yang belum dapat berhasil optimal antara lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Tidak optimalnya pencapaian sasaran ini disebabkan oleh beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara umum adalah bahwa peningkatan kualitas SDM sering dihadapkan oleh kebiasaan – kebiasaan yang tidak mendukung budaya kerja yang baik. Disamping itu kendala pendidikan perangkat Kelurahan kurang mendukung bagi peningkatan profesionalisme. Oleh karena itu untuk perubahan tidak dapat dicapai secara instan melainkan harus melalui proses panjang dengan beberapa langkah pembinaan yang berkelanjutan.

Dari segi anggaran secara umum dapat berjalan tetapi akan lebih efektif jika anggaran untuk unit kerja Pemerintahan Kecamatan benar-benar mengacu pada sistem anggaran kinerja sepenuhnya dan bukan sekedar penyeragaman anagaran Kecamatan dalam satu Kabupaten karena kebutuhan anggaran masing masing Kecamatan berbeda tergantung kondisi wilayahnya.

Dalam anggaran Tahun 2021Kecamatan Kerjo telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar dan Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Namun dalam pelaksanaan tugas masih ada yang belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pelaksanaan operasional kegiatan Kecamatan Kerjo hanya mendapatkan alokasi dana dari APBD Kabupaten Karanganyar.

Demikian Rencana Kerja OrganisasiPerangkat Daerah Tahun 2023ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO



BAB VI

PENUTUP

Selama Tahun Anggaran 2021 secara umum program - program yang telah direncanakan di Kecamatan Kerjo telah berjalan dengan baik, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran srategik dan kegiatan – kegiatan utama pendukung perencanaan sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran yang belum dapat berhasil optimal antara lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Tidak optimalnya pencapaian sasaran ini disebabkan oleh beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara umum adalah bahwa peningkatan kualitas SDM sering dihadapkan oleh kebiasaan – kebiasaan yang tidak mendukung budaya kerja yang baik. Disamping itu kendala pendidikan perangkat Kelurahan kurang mendukung bagi peningkatan profesionalisme. Oleh karena itu untuk perubahan tidak dapat dicapai secara instan melainkan harus melalui proses panjang dengan beberapa langkah pembinaan yang berkelanjutan.

Dari segi anggaran secara umum dapat berjalan tetapi akan lebih efektif jika anggaran untuk unit kerja Pemerintahan Kecamatan benar-benar mengacu pada sistem anggaran kinerja sepenuhnya dan bukan sekedar penyeragaman anggaran Kecamatan dalam satu Kabupaten karena kebutuhan anggaran masing masing Kecamatan berbeda tergantung kondisi wilayahnya.

Dalam anggaran Tahun 2021 Kecamatan Kerjo telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar dan Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Namun dalam pelaksanaan tugas masih ada yang belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pelaksanaan operasional kegiatan Kecamatan Kerjo hanya mendapatkan alokasi dana dari APBD Kabupaten Karanganyar.

Demikian Rencana Kerja OrganisasiPerangkat Daerah Tahun 2023 ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

